



# **RENCANA STRATEGIS LPP RRI 2020-2024**

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA**

## KATA PENGANTAR

Rencana strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tahun 2020 – 2014 merupakan paket kebijakan strategis yang akan dilaksanakan Dewan Pengawas LPP RRI dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Renstra ini disusun untuk memenuhi perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Nasional oleh Pejabat Kementerian/Lembaga untuk menyiapkan rancangan rencana strategis Kementerian / Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir tersebut, ada 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Renstra disusun dengan mempertimbangkan secara prinsipil dan spirit UU 32 tahun 2002 tentang penyiaran, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024 serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Renstra LPP RRI 2020 – 2014 merupakan pedoman operasional bagi Dewan Direksi dan seluruh Satuan Kerja di lingkungan LPP RRI dalam menjalankan tugas dan

fungsinya secara professional sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan, program penyiaran baik on-air maupun off-air. Dokumen renstra ini pada lima tahun ke depan akan menjadi alat ukur untuk mengetahui kinerja organisasi. Kemampuan manajemen dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis merupakan hasil akhir yang sangat diharapkan dan menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mengemban misinya.

Visi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tahun 2020 – 2024 mewujudkan Visi Negara sebagaimana yang ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yakni; Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mendukung Visi ini RRI berkomitmen menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang terpercaya dan mendunia, sebagai acuan dan arah seluruh angkasawan angkasawati RRI dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Misi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia melaksanakan semua Misi Negara sebagaimana ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia, memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa dan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi melalui siaran dengan konten yang berkualitas serta mempunyai nilai pendidikan untuk memenuhi hak warga negara mendapatkan informasi yang independen, netral dan akurat.
2. Menyelenggarakan pelayanan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good public governance*.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana LPP RRI yang berbasis *multiplatform* untuk memudahkan akses bagi masyarakat mendapatkan layanan siaran RRI di wilayah NKRI dan mancanegara.

Tentu tidak mudah menyusun renstra dalam situasi RRI dihadapkan pada kemungkinan adanya transformasi untuk menjadi Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) mengingat RUU-nya telah diusulkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2014 – 2019. Renstra ini di harapkan menjadi pedoman

pelaksanaan operasional kelembagaan dan kinerja secara professional yang terukur serta menghasilkan outcome yang diharapkan.

Renstra ini dipastikan dapat berfungsi dengan baik dan benar jika dijalankan dengan perencanaan matang, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan yang baik di semua satuan kerja LPP RRI di seluruh Indonesia dalam mewujudkan visi kebangsaan Indonesia yang dicita – citakan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Renstra LPP RRI 2020 – 2024 kami menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya.

Jakarta, 28 Mei 2020

Dewan Pengawas LPP RRI



**Mistam, S.Sos, M.Si**  
**Ketua**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii	
Daftar Isi	v	
Daftar Tabel	vi	
<b>BAB I</b>	<b>Pendahuluan</b>	
1.1. Kondisi Umum	1	
1.1.1 Situasi Global	1	
1.1.2 Situasi Regional	2	
1.1.3 Situasi Nasional	3	
1.2. Potensi Permasalahan	5	
<b>BAB II</b>	<b>VISI, MISI DAN TUJUAN</b>	
2.1 Visi	7	
2.2 Misi	7	
2.3 Tujuan	8	
2.4 Sasaran Strategis	8	
<b>BAB III</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	9	
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi LPP RRI	14	
3.3 Kerangka Regulasi	15	
3.4 Kerangka Kelembagaan	19	
<b>BAB IV</b>	<b>TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	
4.1 Target Kinerja	21	
4.2 Kerangka Pendanaan	35	
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Sasaran Strategis LPP RRI
2. Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2020-2024
3. Tabel 4.2 Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2020-2024
4. Tabel 4.3 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Program dan Produksi LPP RRI Tahun 2020-2024
5. Tabel 4.4 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Teknologi dan Media Baru LPP RRI Tahun 2020-2024
6. Tabel 4.5 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Tahun 2020-2024
7. Tabel 4.6 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Sumber Daya Manusia LPP RRI Tahun 2020-2024
8. Tabel 4.7 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Keuangan LPP RRI Tahun 2020-2024
9. Tabel 4.8 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Pengawasan Intern LPP RRI Tahun 2020-2024
10. Tabel 4.9 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Puslitbangdiklat LPP RRI Tahun 2020-2024
11. Tabel 4.10 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI Tahun 2020-2024
12. Tabel 4.11 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Pemberitaan LPP RRI Tahun 2020-2024
13. Tabel 4.12 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun Penyiaran LPP RRI Tahun 2020-2024
14. Tabel 4.13 Rencana Kebutuhan Pendanaan Program LPP RRI 2020-2024
15. Tabel 4.14 Rencana Kebutuhan Pendanaan Kegiatan LPP RRI 2020-2024

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum

Keberadaan organisasi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan di mana organisasi berada, begitu juga RRI. Sebagai lembaga penyiaran publik, keberadaan RRI tidak dapat dilepaskan dari dinamika lingkungan eksternal. Kemampuan RRI dalam melakukan penyesuaian diri atas dinamika lingkungan eksternal yang terus berubah dapat memengaruhi keberadaan dan keberlangsungan RRI di masa sekarang dan akan datang. Oleh karena itu, penting untuk memahami lingkungan eksternal.

#### 1.1.1 Situasi Global

Perubahan yang begitu cepat pada semua sektor kehidupan manusia telah menciptakan sebuah lingkungan yang semakin mengglobal, yang ditandai oleh sirnanya batas-batas negara/bangsa (*state borderless*). Interkoneksi, integrasi, dan interdependensi telah menjadi ciri khas dunia saat ini, yang lebih dikenal sebagai globalisasi. Dalam konteks globalisasi, batas-batas negara/bangsa menjadi kabur, sementara uang, barang, jasa dan manusia dapat bergerak bebas tanpa hambatan, terlebih lagi dengan dukungan teknologi digital yang mentransformasi berbagai sektor. Pengaruh positifnya bahwa manusia dapat membangun jaringan untuk saling belajar satu dengan lain dan juga bekerja sama dalam suatu gerakan global (*global movement*) demi mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi, membangun solidaritas demi kehidupan yang lebih baik. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah bahwa globalisasi tidak selalumbawa nilai-nilai yang mungkin tidak sesuai dengan kearifan lokal ataupun nasional suatu bangsa. Identitas suatu bangsa kini dihadapkan dengan identitas lain pada tataran global, di mana keduanya akan berinteraksi secara dinamis dan mungkin juga hegemonik. Globalisasi informasi dan komunikasi melalui persebaran informasi global memungkinkan hegemoni suatu kebudayaan terhadap kebudayaan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi suatu bangsa untuk memiliki strategi kebudayaan agar kebudayaannya tidak dilindas oleh

globalisasi, dan hanya menjadi sekadar pasar bagi produk-produk budaya lain yang mengalir dari produsen-produsen produk budaya global.

Ciri lain globalisasi yang tidak bisa dinafikan adalah interdependensi, dunia saling bergantung satu dengan lainnya. Apa yang terjadi pada suatu belahan dunia akan memberikan imbas bagi dunia lainnya. Untuk itulah, maka informasi menjadi semakin penting karena melalui informasi itulah individu-individu dalam masyarakat akan mempunyai pengetahuan dan kesadaran atas diri dan lingkungannya. Pengetahuan dan kesadaran inilah yang akan membuat mereka bisa terlibat sebagai subjek dalam kehidupan publik. Digitalisasi membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat secara global. Banyak sektor-sektor yang mengalami percepatan dan ada sektor yang justru mengalami penurunan peran. Dalam situasi semacam ini, tantangannya kemudian adalah bagaimana institusi dapat mengaplikasikan dan mengakselerasikan teknologi digital dalam proses usahanya untuk menciptakan sistem komunikasi yang efisien dan adil, mampu melayani seluruh warga negara sehingga mereka bisa terlibat secara aktif dalam kehidupan publik.

#### 1.1.2 Situasi Regional

Globalisasi bukanlah perubahan sosial dan politik satu dimensi, melainkan merupakan realitas banyak wajah (*multifacet*). Meskipun dunia bergerak ke arah tatanan yang semakin mengglobal, tetapi negara-negara di kawasan juga semakin mengintegrasikan diri. Dalam konteks negara-negara kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, perkembangan mutakhir adalah upaya untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang sering disebut MEA. Menurut BBC Indonesia, pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.



Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Bangsa Indonesia. Pasar tunggal ASEAN berarti pula kesempatan pasar dan tenaga kerja, tetapi juga sekaligus ancaman atas serbuan barang-barang dan tenaga kerja dari negara lain di kawasan.

Kompetisi selalu mensyaratkan informasi. Dalam *Making Globalization Work*, Joseph Stiglitz (2007) mengemukakan bahwa informasi merupakan prasyarat penting bagi kompetisi yang adil, suatu komunikasi yang simetris. Kelompok-kelompok masyarakat tertentu acapkali memenangkan persaingan karena mereka mempunyai informasi yang cukup dan akurat. Sebaliknya, masyarakat miskin gagal mendapatkan keuntungan yang memadai dari proses globalisasi karena langkanya informasi. Oleh karena itu, menurut Stiglitz, informasi haruslah terbuka dan tersedia bagi masyarakat miskin agar mereka mendapatkan keuntungan dari perdagangan (bebas).

### 1.1.3 Situasi Nasional

Di tingkat nasional, kita dihadapkan pada proses demokratisasi politik yang mulai terkonsolidasi dengan baik. Pemilihan umum sebagai sarana kontestasi politik dan pergantian kekuasaan politik pemerintahan telah berlangsung dengan baik dan lancar. Pendewasaan berpolitik dan berdemokrasi berproses dengan baik. Kemerdekaan berekspresi telah dijamin melalui undang-undang meskipun dalam implementasinya masih mengandung beberapa persoalan. Masyarakat juga semakin kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan, terutama sejak kemerdekaan pers mendapatkan jaminan undang-undang. Ini membuat masyarakat mampu melakukan kontrol secara masif kepada pemerintah.

Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers mendapatkan jaminan kemerdekaannya dalam mencari, mengolah, menyimpan, dan

menyebarkan informasi. Pers kini jauh lebih mampu dalam melaksanakan fungsinya sebagai 'penjaga kekuasaan (*watchdog*)' dalam sistem demokrasi. Meskipun demikian, menguatnya kapitalisasi media yang mendorong media untuk lebih menonjolkan dirinya sebagai institusi bisnis dibandingkan dengan institusi sosial membuat media lebih sering terjebak ke dalam isu-isu sensasional dalam bentuk skandal politik dan kriminalitas. Ini pada titik tertentu mengganggu demokrasi karena menghalangi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang objektif. Informasi yang tidak hanya relevan, tapi juga signifikan bagi kehidupannya.

Perkembangan lainnya yang tidak kalah penting adalah percepatan pembangunan oleh pemerintah. Meskipun masing-masing pemerintahan memberi penekanan yang berbeda, tetapi orientasi utama pembangunan untuk mengentaskan masyarakat miskin terus menjadi prioritas. Hal tersebut dilakukan demi lebih mengintegrasikan masyarakat Indonesia, membuka akses layanan publik, meningkatkan produktivitas dan memperlancar arus barang-barang dan manusia. Dengan begitu, diharapkan bukan hanya akan meningkatkan daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga demi semakin menjaga keutuhan Bangsa Indonesia karena wilayah-wilayah Indonesia semakin terhubung satu dengan lainnya. Melalui RPJMN, Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan agar bisa mengejar kemakmuran dan kesejahteraan, setara dengan negara-negara yang telah maju.

Perubahan yang paling signifikan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah implementasi teknologi digital atau yang lebih dikenal dengan transformasi digital di sektor-sektor ekonomi nasional. Paradigma digital mengubah proses usaha dari berbagai industri. Sebagai contoh, industri transportasi mengalami peningkatan signifikan sejalan dengan adopsi teknologi digital di dalamnya, bahkan dua dari lima unicorn Asia merupakan industri yang berbasis transportasi. Hal ini perlu menjadi perhatian RRI untuk dapat terus berkembang dalam melayani publik

dengan menyesuaikan proses usaha yang melibatkan transformasi digital di dalamnya.

## 1.2. Potensi dan Permasalahannya

Dalam upaya menjalankan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan yang harus diwaspadai agar tidak mengganggu proses pelayanan.

Potensi yang dimiliki Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:

- a. Luasnya Jangkauan Siaran RRI di seluruh Indonesia dan luar negeri;
- b. Pengembangan Layanan Siaran RRI berbasis Multiplatform (audio, video dan teks);
- c. Peran RRI sebagai *second track diplomacy* melalui Siaran Luar Negeri (*Voice of Indonesia*) yang bersiaran dalam 9 bahasa (bahasa Indonesia, Mandarin, Jepang, Perancis, Arab, Inggris, Spanyol, Jerman dan Belanda);
- d. RRI media yang efektif dan efisien dalam menyebarkan informasi ke seluruh wilayah NKRI.

Permasalahan yang dihadapi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran

radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:

- a. Branding RRI sebagai radio publik berbasis multiplatform (radio publik modern) yang berkualitas belum tersosialisasikan dengan baik;
- b. Luas jangkauan siaran RRI belum dimanfaatkan secara optimal oleh stakeholder sebagai media penyebarluasan informasi/media partner (bridging information);
- c. Populasi pendengar RRI yang belum sebanding dengan luas jangkauan siaran;
- d. Layanan siaran RRI berbasis multiplatform belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat;
- e. Belum optimalnya sasaran Siaran Luar Negeri (VOI) sebagai media diplomasi bangsa (second track diplomacy);
- f. Teknologi RRI yang belum selaras dengan perkembangan teknologi digital di dunia internasional.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

#### **2.1. Visi**

Visi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tahun 2020 – 2024 mewujudkan Visi Negara sebagaimana yang ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yakni; Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mendukung Visi ini RRI berkomitmen menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang terpercaya dan mendunia, sebagai acuan dan arah seluruh angkasawan angkasawati RRI dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

#### **2.2. Misi**

Misi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia melaksanakan semua Misi Negara sebagaimana ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia, memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa dan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi melalui siaran dengan konten yang berkualitas serta mempunyai nilai pendidikan untuk memenuhi hak warga negara mendapatkan informasi yang independen, netral dan akurat.
2. Menyelenggarakan pelayanan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good public governance*.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana LPP RRI yang berbasis *multiplatform* untuk memudahkan akses bagi masyarakat mendapatkan layanan siaran RRI di wilayah NKRI dan mancanegara.

### 2.3. Tujuan

Tujuan adalah rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden Republik Indonesia. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh RRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk periode 2020-2024 adalah memberikan layanan informasi yang Independen, netral dan akurat, mempunyai nilai pendidikan, dan hiburan yang sehat yang menjunjung tinggi keberagaman, identitas nasional, dan mendukung diplomasi Indonesia di tingkat global dengan berpegang pada prinsip *good public governance*.

### 2.4. Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia telah menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh LPP RRI, yakni Tersedianya akses dan program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio, serta Terwujudnya tata kelola LPP RRI berdasarkan prinsip *good public governance*.

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Strategis LPP RRI**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>
Memberikan layanan informasi yang Independen, netral dan akurat, mempunyai nilai pendidikan, dan hiburan yang sehat yang menjunjung tinggi keberagaman, identitas nasional, dan mendukung diplomasi Indonesia di tingkat global dengan berpegang pada prinsip <i>good public governance</i>	1. Tersedianya akses dan program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio 2. Terwujudnya tata kelola LPP RRI berdasarkan prinsip <i>good public governance</i>

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI**  
**DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir tersebut, ada 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Ketujuh agenda pembangunan nasional tersebut adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan sasaran dan tujuan RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) agenda pembangunan nasional yang menjadi acuan Lembaga Penyiaran Publik RRI dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam mendukung

program pembangunan nasional. Keempat agenda pembangunan nasional tersebut, meliputi:

#### 1. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk (agama, etnis, ras, budaya, bahasa, adat istiadat, keyakinan lokal), yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: *Bhinneka Tunggal Ika*. Maka, setiap komponen bangsa yang berbeda harus senantiasa menjaga persatuan, memperkuat kohesi sosial, dan membangun harmoni dalam perbedaan dan keragaman, yang dilandasi oleh semangat dan jiwa gotong royong sebagai jati diri bangsa. Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada keragaman dan perbedaan, bukan pada persamaan dan keseragaman.

Dalam RPJMN IV Tahun 2020-2024, upaya pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa terus dilanjutkan. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa dilaksanakan secara lebih holistik dan integratif melalui pemajuan kebudayaan, pendidikan karakter dan budi pekerti, pendidikan agama dan etika, pendidikan kewargaan dan bela negara, peningkatan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama, peningkatan peran keluarga dan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan budaya literasi dengan melibatkan segenap komponen bangsa. Perlu upaya yang terintegrasi dari semua komponen bangsa, baik pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, komponen masyarakat dan media.

Arah kebijakan dan strategi membangun kebudayaan dan karakter bangsa pada tahun 2020-2024 menjadi acuan bagi RRI sebagai media penyiaran radio dalam mendukung peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, melalui pengembangan dan penguatan konten literasi.

Untuk mendukung Program Prioritas Nasional ini, RRI memiliki Program khusus budaya, yaitu Program 4 (Pro-4) di seluruh Indonesia yang fokus dan *concern* pada upaya membangun identitas bangsa, memperkuat jati diri



dan budaya bangsa, serta mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal melalui berbagai acara siaran.

## 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia. Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia masih perlu terus ditingkatkan.

Pembangunan infrastruktur pada periode 2020-2024 akan difokuskan pada tiga kerangka utama (Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan) yang ditopang dengan pembangunan energi dan ketenagalistrikan serta pelaksanaan transformasi digital. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar diprioritaskan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Arah kebijakan dan strategi dalam memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar pada tahun 2020-2024 yang mencakup aspek pembangunan transformasi digital melalui pengembangan infrastruktur penyiaran, pemanfaatan TIK dan pengembangan literasi dan keahlian TIK.

Dalam konteks ini RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik perlu diperkuat dan dikembangkan infrastruktur penyiaran digital melalui pendekatan *simulcast* (berjalan secara alami), pemanfaatan infrastruktur TIK dan peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital di seluruh Indonesia guna mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar pada tahun 2020-2024. Selain itu, RRI juga perlu dilakukan peremajaan infrastruktur yang dimiliki saat ini serta menambah pemancar-pemancar baru yang akan

ditempatkan di daerah-daerah *blank spot* untuk menjamin ketersediaan akses masyarakat mendengarkan siaran RRI di seluruh wilayah NKRI termasuk di wilayah 3 T.

### 3. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta (3) mitigasi perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon.

Indonesia tercatat memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi, dengan sebagian besar di antaranya merupakan bencana hidrometeorologis yang terkait dengan iklim dan dinamika perubahannya, antara lain puting beliung, banjir, banjir bandang, longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta cuaca ekstrim. Pengendalian pencemaran sampah plastik dan limbah industri yang masih perlu ditingkatkan serta rehabilitasi hutan dan lahan untuk pemulihan lahan kritis serta daerah aliran sungai (DAS).

Arah kebijakan dan strategi membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim pada tahun 2020-2024 yang mencakup aspek peningkatan ketahanan bencana dan iklim melalui penguatan data, informasi dan literasi bencana.

Untuk mendukung Program Prioritas Nasional ini, RRI merancang dan melaksanakan Program Mitigasi Bencana, di antaranya melalui acara siaran “KENTONGAN” sebagai program khusus RRI dalam meningkatkan

ketahanan bencana, dan perubahan iklim pada tahun 2020-2024 di seluruh Indonesia

4. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik  
Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya.

Dalam menghadirkan “kondisi perlu”, pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara.

Arah kebijakan dan strategi memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada tahun 2020-2024 pada program prioritas optimalisasi kebijakan luar negeri melalui peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional.

Untuk mendukung Program Prioritas Nasional ini, RRI memiliki Stasiun Siaran Luar Negeri (*Voice of Indonesia*) yang siaran dalam Siaran Luar Negeri RRI (*Voice of Indonesia*) dengan layanan siaran dalam 9 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, Bahasa Arab, Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Bahasa Perancis dan Bahasa Spanyol, yang berperan sebagai media diplomasi (*second track diplomacy*), guna mendukung citra positif bangsa di dunia internasional. Selain itu guna mendukung program prioritas nasional ini, RRI akan

meningkatkan kualitas isi/program siaran sebagai media literasi masyarakat, meningkatkan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi, pengintegrasian tata kelola informasi publik dan komunikasi publik serta penyediaan konten informasi publik yang berkualitas, merata dan berkeadilan guna mendukung program prioritas nasional dalam peningkatan kualitas komunikasi publik.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi LPP RRI**

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ikut berperan aktif dalam mendukung dan menyukseskan pembangunan nasional guna mewujudkan Indonesia berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan. Peran serta aktif tersebut direfleksikan dengan memberikan layanan di bidang informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat kepada masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan penyiaran radio yang berfungsi pula sebagai perekat dan kontrol sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga citra positif bangsa di dunia Internasional.

Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung 4 (empat) agenda pembangunan nasional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik RRI adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan RRI sebagai media utama dalam peningkatan literasi masyarakat dan radio rujukan pengetahuan yang aktual, faktual dan kredibel, melalui peningkatan kualitas isi/program siaran. Konten yang disiarkan akan selalu mengedepankan pengetahuan dan berbasis riset, sehingga selain berkualitas juga dapat menjadi sumber wawasan pengetahuan baru.
- b. Menjadikan RRI sebagai media rujukan utama berita dan informasi yang akurat, netral, independen, dan objektif.
- c. Menjadi radio publik yang terdepan terkait konten-konten kebudayaan dalam rangka membangun identitas bangsa, memperkuat jati diri dan budaya bangsa, serta mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal melalui berbagai acara siaran, melalui optimalisasi program khusus budaya, Programa 4 (Pro-4) dengan tagline “Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan”

- d. Melakukan diversifikasi usaha dengan melakukan transformasi digital dalam penyiaran radio dengan memanfaatkan infrastruktur TIK dalam meningkatkan layanan informasi dan hiburan berbasis multiplatform, serta meningkatkan fasilitas pendukung transformasi penyiaran radio digital di seluruh Indonesia.
- e. Menjadi radio rujukan utama mitigasi bencana. Strategi ini kedepannya akan menjadikan RRI sebagai media Early Warning System (EWS) dan sarana literasi tanggap bencana bagi masyarakat. Salah satunya dengan merancang dan melaksanakan program siaran khusus mitigasi bencana melalui acara siaran Radio Tanggap Bencana “KENTONGAN” di RRI seluruh Indonesia.
- f. Memperkuat dan meningkatkan peran Stasiun Siaran Luar Negeri RRI sebagai radio diplomasi bangsa (second track diplomacy), melalui layanan siaran dalam 9 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, Bahasa Arab, Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Bahasa Perancis dan Bahasa Spanyol, guna mendukung program prioritas nasional “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” dalam rangka meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri.
- g. Mewujudkan tata kelola Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja serta berorientasi pelayanan.

### **3.3. Kerangka Regulasi**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis LPP RRI, diusulkan masukan atas perubahan/revisi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang PNBPN serta memberikan masukan atas RUU RTRI yang mendukung penguatan kelembagaan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, dalam program legislasi nasional jangka menengah 2020-2024 terkait masukan atas revisi RUU Penyiaran dan RUU RTRI. Selain itu regulasi-regulasi teknis yang ditetapkan oleh LPP RRI sebagai pedoman dan acuan dalam pengelolaan operasional LPP RRI, baik di bidang program dan produksi, bidang teknologi

dan media baru, bidang layanan dan pengembangan usaha, bidang SDM dan Umum serta bidang keuangan.

Rincian masukan atas revisi undang-undang terkait penguatan kelembagaan RRI sebagai Radio Publik, meliputi:

1. RUU tentang Perubahan/revisi atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Penyiaran;
2. RUU tentang RTRI sebagai regulasi yang memperkuat eksistensi RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik.

Urgensi masukan atas revisi undang-undang sebagai kerangka regulasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. RUU tentang Perubahan/revisi atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Penyiaran;

Urgensi perubahannya:

- a. Memecahkan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik khususnya RRI saat ini dan mengantisipasi sistem pengelolaan LPP RRI selaras dengan perkembangan teknologi digital.
  - b. Memperkuat eksistensi kelembagaan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik selaras dengan paket undang-undang yang ada.
  - c. Menyesuaikan dengan paket undang-undang yang telah ada, baik dari aspek kelembagaan, organisasi, keuangan, ASN, dan aset.
2. RUU tentang RTRI sebagai regulasi yang memperkuat eksistensi RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik.

Urgensi pembentukannya:

- a. Diharapkan akan menjadi dasar hukum yang kuat bagi keberadaan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang independen, netral dan profesional;
- b. Memperjelas dan memperkuat bentuk kelembagaan dan struktur organisasi RTRI sebagai lembaga negara penyelenggara penyiaran

publik yang berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat dan negara;

- c. Menjamin kepastian pelaksanaan transformasi digital bagi penyiaran radio publik selaras dengan prioritas nasional

Rincian masukan atas revisi Peraturan Pemerintah terkait penguatan kelembagaan RRI dan pengelolaan PNBPN di lingkungan LPP RRI sebagai Radio Publik, meliputi:

1. Rancangan perubahan/revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
2. Rancangan perubahan/revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBPN pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
3. Rancangan regulasi tentang pembentukan badan layanan usaha yang menjadi unit kerja di bawah (*subsidiary*) LPP RRI untuk mendukung kebutuhan operasional siaran

Urgensi masukan atas revisi Peraturan Pemerintah sebagai kerangka regulasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Rancangan perubahan/revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Urgensi Perubahannya:

- a. Memecahkan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik dalam hal pengelolaan kepegawaian (saat ini tidak memiliki kewenangan sebagai PPK), dan tata kelola lembaga selaras dengan paket-paket regulasi sistem ketatanegaraan;
- b. Memperkuat eksistensi kelembagaan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik sambil menunggu perubahan/revisi UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran.

2. Rancangan perubahan/revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Urgensi perubahannya:

- a. Memecahkan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PNBP di Lembaga Penyiaran Publik RRI, dalam hal penyesuaian tarif, jenis PNBP, dan mekanisme barter;
- b. Menyesuaikan dengan perubahan UU 9 Tahun 2018 tentang PNBP;
- c. Perbaiki kebijakan pengelolaan PNBP selaras dengan peran dan fungsi RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

3. Rancangan regulasi tentang pembentukan badan layanan usaha yang menjadi unit kerja di bawah (*subsidiary*) LPP RRI untuk mendukung kebutuhan operasional siaran

Urgensi Pembentukannya:

- a. Mendorong tumbuhnya/meningkatnya sektor pendapatan yang bersumber dari PNBP melalui pembentukan badan layanan usaha yang menjadi unit kerja di bawah (*subsidiary*) LPP RRI untuk mendukung kebutuhan operasional siaran;
- b. Memberikan keleluasaan dalam mengeksplorasi potensi yang dimiliki RRI sebagai sumber pendapatan PNBP;
- c. Memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak saat ini dan mengantisipasi sistem pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke depan.

Selain memberikan masukan atas perubahan RUU RTRI dan mengusulkan perubahan atas PP Nomor 12 Tahun 2005, PP Nomor 5 Tahun 2015 serta mengusulkan regulasi terkait pembentukan badan layanan usaha sebagai unit kerja di bawah (*subsidiary*) LPP RRI, pada periode 2020-2024 LPP RRI juga akan menyusun dan menetapkan regulasi internal untuk memberikan penguatan terhadap operasional LPP RRI, melalui penyusunan beberapa regulasi internal, antara lain:



1. Peraturan Direktur Utama tentang Kebijakan Operasional Siaran di lingkungan LPP RRI;
2. Peraturan Direktur Utama tentang Kebijakan Teknologi dan Media Baru LPP RRI;
3. Peraturan Direktur Utama tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0%;
4. Peraturan Direktur Utama tentang Penetapan Target Pendapatan PNBP;
5. Peraturan Direktur Utama tentang Penetapan Jenis Layanan Publik RRI;
6. Peraturan Direktur Utama tentang Implementasi Sistem Aplikasi e-PNBP (PNBP Online);
7. Peraturan Direktur Utama tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja di lingkungan LPP RRI;
8. Peraturan Direktur Utama tentang Humas dan Protokol di lingkungan LPP RRI;
9. Peraturan Direktur Utama tentang Tata Kelola di bidang SDM, Keuangan, dan Aset.

#### **3.4. Kerangka Kelembagaan**

Dalam rangka mencapai visi, misi dan strategi LPP RRI sebagaimana telah dijabarkan pada Bab sebelumnya, LPP RRI harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan pada LPP RRI secara efektif dan efisien, baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat Satker RRI di seluruh Indonesia. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi: organisasi dan proses bisnis/tatalaksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, LPP RRI berpedoman pada Peraturan Dewan Pengawas LPP RRI Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum, Penyiaran, Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya, yang merupakan kelanjutan dan perbaikan dari reformasi birokrasi yang telah dimulai sejak tahun 2015. Hal ini tercermin

melalui beberapa kebijakan tentang pengembangan kelembagaan dan sumber daya, meliputi:

1. Pengkajian lembaga penyiaran publik yang sesuai dengan konteks Indonesia;
2. Peningkatan kapasitas atau status stasiun penyiaran tipe C di ibu kota provinsi serta studio produksi di ibu kota kabupaten/kota serta di wilayah lainnya;
3. Pengoptimalan implementasi reformasi birokrasi (Transformasi RRI);
4. Penguatan kelembagaan RRI sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi penyiaran publik dalam rangka mewujudkan RTRI;
5. Penataan organisasi di tingkat pusat (Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Data dan Informasi, Maintenance Center, Pusat Layanan Pengadaan);
6. Pengembangan kelembagaan yang ramping struktur, kaya fungsi, serta tepat ukuran (rightsizing), dan pembentukan jabatan Staf Ahli/Tenaga Ahli;
7. Pengusulan perubahan PP Nomor 12 Tahun 2005; dan
8. Peningkatan sinergitas SLN dengan Pusat Pemberitaan, dan stasiun penyiaran lainnya.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, serta mendukung program prioritas nasional, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis, yang diarahkan pada pencapaian kondisi yang ingin dicapai secara nyata serta mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Strategis dan Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja**  
**Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2020-2024**

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					SATUAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Memberikan layanan informasi yang Independen, netral dan akurat, mempunyai nilai pendidikan, dan hiburan yang sehat yang menjunjung tinggi keberagaman, identitas nasional, dan mendukung diplomasi Indonesia di tingkat global dengan berpegang pada prinsip <i>good public governance</i></b>							
<b>Tersedianya akses dan program informasi yang akurat, mempunyai nilai pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio</b>	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas isi siaran baik melalui radio maupun multiplatform (survey dan analisis konten)	70	75	80	85	90	%
	Tingkat pemanfaatan konten RRI sebagai radio rujukan utama dan sebagai media diplomasi bangsa ( <i>second track diplomacy</i> ) (survey dan analisis konten)	70	75	80	85	90	%

<b>Terwujudnya tata kelola LPP RRI yang transparan dan akuntabel</b>	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan LPP RRI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	OPINI BPK
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----------

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan beberapa Program sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program (*Outcome*): Meningkatkan tata kelola LPP RRI yang transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja Program:

- a. Penilaian dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di LPP RRI;
- b. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan LPP RRI.

2. Program Penyiaran Publik

Sasaran Program (*Outcome*): Meningkatkan ketersediaan akses dan program informasi yang akurat, mempunyai nilai pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio. Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut.

- a. Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi dan hiburan yang sehat
- b. *Audience share* RRI
- c. Layanan Media *Multiplatform* yang mempunyai standar kualitas yang bagus

**Tabel 4.2**  
**Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program**  
**Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2020-2024**

PROGRAM/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET					SATUAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen							
Meningkatkan tata kelola LPP RRI yang transparan dan akuntabel	Penilaian dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di LPP RRI	B	B	BB	BB	A	Nilai
	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan LPP RRI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini BPK
Program Penyiaran Publik							
Meningkatkan ketersediaan akses dan program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio.	Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi dan hiburan yang sehat	80%	85%	90%	93%	95%	%
	<i>Audience share</i> RRI	80%	85%	90%	93%	95%	%
	Layanan Media <i>Multipatform</i> yang mempunyai standar kualitas yang bagus	70%	75%	80%	85%	90%	%

Dalam rangka mencapai sasaran program yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2020-2024, telah ditetapkan kinerja kegiatan dan sasaran kinerja kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Direktorat Program dan Produksi

Kegiatan: Meningkatkan kualitas layanan siaran RRI berbasis *multipatform*

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya kualitas program dan produksi penyiaran

Indikator Kinerja Kegiatan:

a. Pendengar RRI

- b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas konten (survey responden/publik)
- c. Konten Layanan Media Multiplatform yang mempunyai standar kualitas yang bagus

**Tabel 4.3**  
**Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Direktorat Program dan Produksi LPP RRI Tahun 2020-2024**

KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					Uraian
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan kualitas layanan siaran RRI berbasis multiplatform							
Terwujudnya kualitas program dan produksi penyiaran	Pendengar RRI	45	47	50	52	55	Juta Jiwa
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas konten (survey responden/publik)	70	75	80	85	90	%
	Konten Layanan Media <i>Multiplatform</i> yang mempunyai standar kualitas yang bagus	70	75	80	85	90	%

2. Direktorat Teknologi dan Media Baru

Kegiatan: Meningkatkan akses layanan siaran RRI berbasis *multiplatform*

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya kemudahan akses layanan siaran RRI bagi masyarakat

Indikator Kinerja Kegiatan:

- a. Jangkauan siaran RRI
- b. Jangkauan siaran RRI di wilayah 3 T
- c. Layanan multiplatform
- d. Lokasi EWS

**Tabel 4.4**  
**Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Direktorat Teknologi dan Media Baru LPP RRI Tahun 2020-2024**

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan akses layanan siaran RRI berbasis <i>multiplatform</i>							
Terwujudnya kemudahan akses layanan siaran RRI bagi masyarakat	Jangkauan siaran RRI	80	84	90	94	97	%
	Jangkauan siaran RRI di wilayah 3 T	80	84	90	94	97	%
	Layanan <i>multiplatform</i>	9	10	10	10	10	Media Layanan
	Lokasi EWS	5	10	15	20	25	Lokasi

3. Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha

Kegiatan: Meningkatkan kualitas layanan, stigma/branding RRI dan pendapatan PNBP

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya kualitas layanan, stigma/ branding RRI dan pendapatan PNBP

Indikator Kinerja Kegiatan:

- a. Stakeholder yang memanfaatkan RRI sebagai media penyebarluasan informasi

- b. Sosialisasi/branding RRI kepada masyarakat/stakeholder
- c. Tingkat kualitas layanan informasi publik
- d. Pendapatan PNBP

**Tabel 4.5**  
**Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Tahun 2020-2024**

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan kualitas layanan, stigma/branding RRI dan pendapatan PNBP							
Terwujudnya kualitas layanan, stigma/branding RRI dan pendapatan PNBP	Stakeholder yang memanfaatkan RRI sebagai media penyebarluasan informasi	5000	5500	6000	6500	7000	Dokumen kerjasama
	Sosialisasi/branding RRI kepada masyarakat/stakeholder	12	12	12	12	12	Kali
	Tingkat kualitas layanan informasi publik	60	70	80	90	95	%
	Pendapatan PNBP	35	40	45	50	55	Miliar

4. Direktorat SDM dan Umum

Kegiatan: Melaksanakan pengelolaan SDM, aset dan tata kelola organisasi yang akuntabel

Sasaran Kegiatan: Terlaksananya tata kelola pengelolaan SDM, aset, dan kelembagaan yang akuntabel



Indikator Kinerja Kegiatan:

- a. Utilisasi aset dibandingkan dengan total aset
- b. Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
- c. Tingkat kepatuhan pegawai terhadap LHKPN dan LHKASN
- d. Proses bisnis/SOP terhadap bidang tugas jabatan
- e. Tingkat Maturitas SPIP

**Tabel 4.6**  
**Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Direktorat Sumber Daya Manusia LPP RRI Tahun 2020-2024**

KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
Melaksanakan pengelolaan SDM, aset dan tata kelola organisasi yang akuntabel							
Terlaksananya tata kelola pengelolaan SDM, aset, dan kelembagaan yang akuntabel	Utilisasi aset dibandingkan dengan total aset	80	85	90	95	95	%
	Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	70	80	80	90	100	%
	Tingkat kepatuhan pegawai terhadap LHKPN dan LHKASN	90	95	98	98	100	%
	Proses bisnis/SOP terhadap bidang tugas jabatan	75	85	95	97	100	%
	Tingkat Maturitas SPIP	4	4	4	4	5	Level

5. Direktorat Keuangan

Kegiatan: Melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Sasaran Kegiatan: Terlaksananya tata kelola keuangan secara transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja Kegiatan:

- a. Akurasi perencanaan Anggaran
- b. Kinerja pelaksanaan anggaran
- c. Penilaian evaluasi pelaksanaan anggaran
- d. Potensi kerugian keuangan negara

**Tabel 4.7**  
**Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Direktorat Keuangan LPP RRI Tahun 2020-2024**

KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
Melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel							
Terlaksananya tata kelola keuangan secara transparan dan akuntabel	Akurasi perencanaan anggaran	85	87	89	91	93	Nilai
	Kinerja pelaksanaan anggaran	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	%
	Penilaian evaluasi pelaksanaan anggaran	83	85	87	89	90	Nilai
	Potensi kerugian keuangan negara	3	3	2	2	1	%

## 6. Satuan Pengawasan Intern

Kegiatan: Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal secara baik, benar dan akuntabel

Indikator Kinerja Kegiatan:

- a. Penyelesaian rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti
- b. Penyelesaian rekomendasi Audit internal yang ditindaklanjuti
- c. Penyelesaian kerugian keuangan negara
- d. Tingkat kapabilitas APIP

**Tabel 4.8**  
**Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Satuan Pengawasan Intern LPP RRI Tahun 2020-2024**

KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal							
Terwujudnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal secara baik, benar dan akuntabel	Penyelesaian rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti	75	80	85	90	95	%
	Penyelesaian rekomendasi Audit internal yang ditindaklanjuti	80	85	90	95	95	%
	Penyelesaian kerugian keuangan negara	70	75	80	85	90	%
	Tingkat kapabilitas APIP	3	3	4	4	5	Level

7. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Kegiatan: Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan

Sasaran Kegiatan: Terlaksananya kualitas penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan selaras dengan kebutuhan lembaga

Indikator Kinerja Kegiatan:

- a. Penelitian/riset tentang kepuasan masyarakat terhadap kualitas konten non berita (survey responden/publik)
- b. Penelitian/riset tentang kepuasan masyarakat terhadap kualitas konten berita dan informasi
- c. Penelitian/riset tentang pemanfaatan konten RRI sebagai media diplomasi bangsa (second track diplomacy)
- d. Penelitian/riset tentang jangkauan siaran RRI terhadap populasi
- e. Penelitian/riset tentang pemirsa/penonton RRI Net
- f. Penilaian akreditasi sebagai lembaga kediklatan
- g. Jumlah wartawan/jurnalis RRI yang telah bersertifikat
- h. Pelatihan teknis/fungsional
- i. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
- j. Pelatihan Kepemimpinan Administator (PKA)
- k. Lulusan diklat dengan predikat minimal memuaskan

**Tabel 4.9**  
**Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Puslitbangdiklat LPP RRI Tahun 2020-2024**

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan							
Terlaksananya kualitas penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan	Penelitian/riset tentang kepuasan masyarakat terhadap kualitas konten non berita (survey responden/publik)	3	3	3	3	3	Jumlah Penelitian
	Penelitian/riset tentang kepuasan masyarakat terhadap kualitas konten berita dan informasi	1	1	1	1	1	Jumlah Penelitian

selaras dengan kebutuhan lembaga	Penelitian/riset tentang pemanfaatan konten RRI sebagai media diplomasi bangsa ( <i>second track diplomacy</i> )	0	1	1	1	1	Jumlah Penelitian
	Penelitian/riset tentang jangkauan siaran RRI terhadap populasi	1	2	2	2	2	Jumlah Penelitian
	Penelitian/riset tentang pemirsa/penonton RRI Net	1	2	2	2	2	Jumlah Penelitian
	Penilaian akreditasi sebagai lembaga kediklatan	B	B	B	A	A	Nilai
	Jumlah wartawan/jurnalis RRI yang telah bersertifikat	25	30	35	40	45	Orang
	Pelatihan teknis/fungsional	8	10	10	12	12	Jumlah Pelatihan
	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	1	2	2	2	2	Jumlah Pelatihan
	Pelatihan Kepemimpinan Administator (PKA)	1	2	2	2	2	Jumlah Pelatihan
	Lulusan diklat dengan predikat minimal memuaskan	90	90	90	90	90	%

## 8. Stasiun Siaran Luar Negeri

Kegiatan: Meningkatkan peran RRI sebagai media diplomasi bangsa (*second track diplomacy*) melalui Siaran Luar Negeri

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya siaran luar negeri RRI sebagai media diplomasi bangsa (*second track diplomacy*)

Indikator Kinerja Kegiatan:

- a. Perwakilan RRI di luar negeri
- b. Koresponden RRI di luar negeri
- c. Kemitraan dengan pihak internasional
- d. Desk layanan siaran bahasa asing

**Tabel 4.10**  
**Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI Tahun 2020-2024**

KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan peran RRI sebagai media diplomasi bangsa ( <i>second track diplomacy</i> ) melalui Siaran Luar Negeri							
Terwujudnya peran RRI sebagai media diplomasi bangsa ( <i>second track diplomacy</i> )	Perwakilan RRI di luar negeri	2	2	3	3	4	Perwakilan
	Koresponden RRI di luar negeri	3	4	5	6	7	Koresponden
	Kemitraan dengan pihak internasional	4	5	6	7	8	Dokumen
	Desk layanan bahasa asing siaran luar negeri sebagai media diplomasi bangsa ( <i>second track diplomacy</i> )	8	8	8	9	9	Bahasa Asing

## 9. Pusat Pemberitaan

Kegiatan: Meningkatkan kualitas konten berita dan informasi sebagai media rujukan utama

Sasaran Kegiatan: Tersedianya konten berita dan informasi yang akurat, netral, independen dan objektif

Indikator Kinerja Kegiatan:

- a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap konten berita dan informasi;
- b. Pendengar Pro-3
- c. Pemirsa/penonton RRI Net
- d. Pengunjung laman rri.co.id (KBRN)

**Tabel 4.11**  
**Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Pusat Pemberitaan LPP RRI Tahun 2020-2024**

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan kualitas konten berita dan informasi sebagai media rujukan utama							
Tersedianya konten berita dan informasi yang akurat, netral, independen dan objektif	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas konten berita dan informasi	70	75	80	83	85	%
	Pendengar Pro-3	2	2,5	3	3,5	4	Juta / Orang
	Pemirsa/penonton RRI Net	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	Orang
	Pengunjung laman rri.co.id (KBRN)	1	1,5	2	2,5	3	Juta / Orang

#### 10. Stasiun Penyiaran RRI

Kegiatan: Meningkatkan kualitas layanan siaran RRI yang bersifat informatif, edukatif dan hiburan yang sehat

Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya siaran RRI yang berkualitas berbasis multiplatform di Wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kota

Indikator Sasaran Kegiatan:

- a. Kepuasan masyarakat terhadap layanan siaran RRI
- b. Stakeholder yang memanfaatkan Stasiun Penyiaran RRI sebagai media penyebarluasan informasi

- c. Penyelesaian pengaduan masyarakat
- d. Penyediaan kualitas layanan informasi publik
- e. Kinerja pelaksanaan anggaran
- f. Sosialisasi/branding RRI kepada masyarakat/stakeholder
- g. Jangkauan Siaran
- h. Implementasi RB
- i. Pendapatan PNBP

**Tabel 4.12**  
**Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Stasiun Penyiaran LPP RRI Tahun 2020-2024**

KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan kualitas layanan siaran RRI yang bersifat informatif, edukatif dan hiburan yang sehat							
Terselenggara	Kepuasan masyarakat terhadap	70	75	80	85	90	%



nya siaran RRI yang berkualitas berbasis <i>multiplatform</i> di Wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kota	layanan siaran RRI						
	Stakeholder yang memanfaatkan Stasiun Penyiaran RRI sebagai media penyebarluasan informasi	60	70	80	90	100	Stake holder
	Penyelesaian pengaduan masyarakat	80	85	90	95	100	%
	Penyediaan kualitas layanan informasi publik	75	80	85	87	90	%
	Kinerja pelaksanaan anggaran	83	85	87	89	90	%
	Sosialisasi/branding RRI kepada masyarakat/stakeholder	12	12	12	12	12	Bulan
	Jangkauan Siaran	85	87	89	91	93	%
	Implementasi RB	8	8	8	8	8	area
	Pendapatan PNB	35	40	45	50	55	Miliar

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka memenuhi target kinerja dan berkontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode 2020-2024 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan pada LPP RRI akan bersumber dari

rupiah murni dan PNBP. Selain sumber pendanaan tersebut, LPP RR juga akan memanfaatkan skema kerjasama dengan pihak swasta melalui mekanisme KPBU untuk mendanai program kerja utama seperti penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung penyiaran.

**Tabel 4.13**  
**Rencana Kebutuhan Pendanaan Program LPP RRI 2020-2024**

No	Program	Indikasi Rencana Kebutuhan Pendanaan Program				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	293,6	305,4	317,6	330,3	343,5
2	Program Peningkatan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	1.019,6	1.060,3	1.102,8	1.146,9	1.192,7

**Tabel 4.14**  
**Rencana Kebutuhan Pendanaan Kegiatan LPP RRI 2020-2024**

No	Kegiatan	Indikasi Rencana Kebutuhan Pendanaan Kegiatan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan kualitas layanan siaran RRI	16,3	16,9	17,6	18,3	19,0

	berbasis <i>multiplatform</i>					
2	Meningkatkan akses layanan siaran RRI berbasis <i>multiplatform</i>	192,6	200,3	208,3	216,6	225,3
3	Meningkatkan kualitas layanan, stigma/branding RRI dan pendapatan PNPB	14,0	14,6	15,2	15,8	16,4
4	Melaksanakan pengelolaan SDM, aset dan tata kelola organisasi yang akuntabel	164,2	170,7	177,5	184,6	192,0
5	Melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	102,0	106,0	110,3	114,7	119,3
6	Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal	10,3	10,7	11,2	11,6	12,1
7	Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan	17,2	17,9	18,6	19,4	20,1
8	Meningkatkan peran RRI sebagai media diplomasi bangsa ( <i>second track diplomacy</i> ) melalui Siaran Luar Negeri	14,3	14,8	15,4	16,0	16,7
9	Meningkatkan kualitas konten berita dan informasi sebagai media rujukan utama	18,2	19,0	19,7	20,5	21,3
10	Meningkatkan kualitas layanan siaran RRI yang bersifat informatif, edukatif dan hiburan yang sehat	764,2	794,8	826,6	859,6	894,0

Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran masing-masing program dan kegiatan dari tahun 2020 s.d. 2024 tertuang dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2020-2024 merupakan arah dan kebijakan LPP RRI 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berbagai program dan kegiatan dirancang dan dirumuskan selaras dan terintegrasi dengan upaya RRI dalam mendukung Program Prioritas Nasional (PN). Dokumen ini menjadi pedoman bagi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan RRI Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Yang Terpercaya dan Mendunia, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, dokumen ini juga menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan memberikan layanan informasi yang Independen, netral dan akurat, mempunyai nilai pendidikan, dan hiburan yang sehat yang menjunjung tinggi keberagaman, identitas nasional, dan mendukung diplomasi Indonesia di tingkat global dengan berpegang pada prinsip *good public governance*, dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi yang meliputi:

1. Menjadikan RRI sebagai media utama dalam peningkatan literasi masyarakat dan radio rujukan pengetahuan yang aktual, faktual dan kredibel, melalui peningkatan kualitas isi/program siaran. Konten yang disiarkan akan selalu mengedepankan pengetahuan dan berbasis riset, sehingga selain berkualitas juga dapat menjadi sumber wawasan pengetahuan baru.
2. Menjadikan RRI sebagai media rujukan utama berita dan informasi yang akurat, netral, independen, dan objektif.
3. Menjadi radio publik yang terdepan terkait konten-konten kebudayaan dalam rangka membangun identitas bangsa, memperkuat jati diri dan budaya bangsa, serta mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal melalui berbagai acara siaran, melalui optimalisasi program khusus budaya, Programa 4 (Pro-4) dengan tagline “Ensiklopedi budaya keindonesiaan”.
4. Melakukan diversifikasi usaha dengan melakukan transformasi digital dalam penyiaran radio dengan memanfaatkan infrastruktur TIK dalam meningkatkan layanan informasi dan hiburan berbasis multiplatform, serta meningkatkan fasilitas pendukung transformasi penyiaran radio digital di seluruh Indonesia.

5. Menjadi radio tanggap bencana sebagai media rujukan utama mitigasi bencana. Strategi ini kedepannya akan menjadikan RRI sebagai media EWS dan sarana literasi tanggap bencana bagi masyarakat. Salah satunya dengan merancang dan melaksanakan program siaran khusus mitigasi bencana melalui acara siaran Radio Tanggap Bencana “KENTONGAN” di RRI seluruh Indonesia.
6. Memperkuat dan meningkatkan peran Stasiun Siaran Luar Negeri RRI sebagai radio diplomasi bangsa (*second track diplomacy*), melalui layanan siaran dalam 9 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, Bahasa Arab, Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Bahasa Perancis dan Bahasa Spanyol, guna mendukung program prioritas nasional dalam “Meningkatkan Citra Positif Indonesia di Luar Negeri”.
7. Mewujudkan tata kelola Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja serta berorientasi pelayanan.

Strategi yang ditetapkan dalam Renstra LPP RRI 2020-2024 dalam rangka mendukung 4 (empat) agenda pembangunan nasional yang menjadi acuan Lembaga Penyiaran Publik RRI dalam menjalankan peran dan fungsinya, meliputi: (1) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa; (2) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (3) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan (4) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.